

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“VALUE FOR MONEY AUDIT”

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun oleh:

Kelompok 11

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Adea Aprilia | 2313031034 |
| 2. Fajriyatur Rohmah | 2313031048 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Value for Money Audit”**.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. 1.**, Ibu **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.**, dan Ibu **Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.** selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada tugas pembuatan makalah ini, baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 19 November 2025

Kelompok 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Value for Money Audit</i>	3
2.2 Tujuan dan Manfaat <i>Value for Money Audit</i>	4
2.3 Karakteristik <i>Value For Money Audit</i>	4
2.4 Tahapan <i>Value For Money Audit</i>	6
2.5 Audit Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas dalam <i>Value for Money Audit</i>	9
BAB III.....	11
PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
STUDI KASUS	13
SOAL POST TEST.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan di sektor publik memegang peran yang sangat penting karena seluruh anggaran yang digunakan berasal dari masyarakat. Artinya, pemerintah harus benar-benar mampu mengelola dana tersebut dengan bertanggung jawab dan transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan tidak menyalahgunakan anggaran semakin meningkat. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menunjukkan bahwa setiap pengeluaran negara benar-benar bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia (Mardiasmo, 2018). Untuk memastikan hal ini, dibutuhkan cara penilaian yang tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga pada kinerja nyata sebuah program (Mahmudi, 2019).

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran tersebut adalah *Value for Money* (VfM). Konsep ini menekankan tiga prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui tiga prinsip ini, auditor dapat melihat apakah suatu instansi pemerintah sudah bekerja dengan hemat, menjalankan program dengan baik, dan memberikan hasil yang sesuai tujuan. Dengan kata lain, audit berbasis VfM tidak hanya menilai apakah prosedur sudah dipatuhi, tetapi juga apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Di Indonesia, audit semacam ini memiliki dasar aturan resmi melalui Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK. SPKN menjadi pedoman bagaimana auditor harus melakukan pemeriksaan, termasuk audit kinerja dan *Value for Money*. Kehadiran aturan ini membuat proses audit menjadi lebih terarah dan terpercaya karena ada standar yang jelas dalam menilai apakah instansi pemerintah sudah mengelola anggaran dengan baik (BPK RI, 2017). Dengan adanya standar tersebut, audit tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga dorongan agar instansi publik terus memperbaiki kinerjanya.

Selain itu, perkembangan kegiatan pemerintah yang semakin kompleks juga membuat audit tradisional menjadi kurang memadai. Banyak program pemerintah yang membutuhkan evaluasi lebih mendalam terkait biaya, proses, dan hasil akhirnya. Audit VfM dianggap lebih cocok karena mampu memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana program dijalankan dan apa saja yang perlu diperbaiki. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, pembahasan mengenai *Value for Money Audit* penting untuk memahami bagaimana dana publik dapat digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa pengertian *Value for Money Audit (performance audit)*?
2. Apa tujuan dan manfaat dari *Value for Money Audit*?
3. Bagaimana karakteristik *Value for Money Audit*?
4. Apa saja ruang lingkup dan tahapan *Audit Performance* ?
5. Bagaimana audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas diterapkan dalam proses audit *Value for Money*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian *Value for Money Audit*.
2. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari *Value for Money Audit*.
3. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik *Value for Money Audit*.
4. Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup dan tahapan *Audit Performance*.
5. Untuk mengetahui audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas diterapkan dalam proses audit *Value for Money*.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup *Value for Money Audit*

Value for Money Audit merupakan jenis audit yang bertujuan melihat sejauh mana anggaran pemerintah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan program. Audit ini tidak hanya fokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga menilai apakah suatu program memberikan nilai terbaik bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, audit ini membantu menjawab apakah instansi pemerintah bekerja secara optimal dalam menggunakan dana publik.

Selain itu, nilai tambah dari audit ini adalah kemampuannya menilai proses dan hasil secara bersamaan. Auditor tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga meninjau bagaimana suatu kegiatan dijalankan dan apa dampaknya bagi masyarakat (Mahmudi, 2019). Hal ini membuat audit *Value for Money* lebih komprehensif dibandingkan audit keuangan biasa.

Audit kinerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat (2), adalah suatu proses evaluasi sistematis terhadap pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan Buku Pedoman Audit Kinerja, audit ini dilakukan secara objektif melalui pemerolehan dan evaluasi bukti, yang memungkinkan penilaian independen mengenai tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas pencapaian hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengguna laporan audit (Fikri, 2022).

Secara keseluruhan, audit ini memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat (Glynn,

Gray, & Jenkins, 1992). Karena itu, *Value for Money* menjadi dasar penting dalam pengawasan sektor publik.

2.2 Tujuan dan Manfaat *Value for Money Audit*

Menurut (Fikri, 2020) tujuan dan manfaat audit kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian Pelaksanaan Berdasarkan Prinsip 3E dan Kepatuhan Peraturan
Audit kinerja bertujuan untuk menilai suatu kegiatan, program, atau proyek agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip efektivitas, keekonomisan, dan efisiensi (3E), serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, dan Tanggung Jawab Pemerintah
Audit ini membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah, meningkatkan transparansi, dan memastikan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sekaligus mendukung kegiatan pengawasan yang efektif.
3. Identifikasi Kekurangan, Penilaian Risiko, dan Pemberian Nilai Tambah
Fokus utama audit adalah mengidentifikasi kelemahan dalam aturan atau pelaksanaannya, memberikan nilai tambah dengan mengidentifikasi risiko yang perlu diperbaiki, serta mendukung pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih baik.

2.3 Karakteristik *Value For Money Audit*

Karakteristik utama dari *Value for Money Audit* adalah fokusnya yang tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga menilai bagaimana suatu program pemerintah dijalankan secara menyeluruh. Adapun karakteristik *Value For Money Audit* adalah sebagai berikut.

1. Berfokus pada Kinerja, Bukan Hanya Kepatuhan

Karakteristik pertama dari *Value for Money Audit* adalah audit ini tidak hanya memeriksa apakah anggaran digunakan sesuai aturan, tetapi juga melihat bagaimana program pemerintah mencapai hasilnya. Pendekatan ini membuat auditor menilai kualitas pelaksanaan program,

bukan sekadar memeriksa dokumen administrasi (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, audit ini memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja sebuah instansi.

2. Menggunakan Pendekatan 3E sebagai Dasar Penilaian

Audit ini ditandai dengan penggunaan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai alat utama dalam menilai kinerja program. Ketiga prinsip tersebut membantu auditor melihat apakah sumber daya digunakan secara hemat, proses berjalan optimal, dan tujuan program tercapai (Glynn et al., 1992). Dengan adanya prinsip 3E, audit *Value for Money* memiliki kriteria yang jelas dan terstruktur.

3. Menilai Hubungan *Input*, Proses, dan *Output* Program

Karakteristik penting lainnya adalah audit ini menilai seluruh tahapan program, mulai dari penggunaan sumber daya hingga hasil yang dicapai. Auditor melihat apakah proses yang dilakukan sudah sesuai standar dan apakah output yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Mahmudi, 2019). Pendekatan menyeluruh ini membuat audit lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja instansi.

4. Berorientasi pada Hasil dan Dampak Program

Audit Value for Money tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga pada hasil akhir yang diterima masyarakat. Auditor memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan positif sesuai tujuan program (Mardiasmo, 2018). Dengan orientasi hasil seperti ini, audit membantu pemerintah memastikan program yang dijalankan benar-benar bermanfaat.

5. Menggunakan Analisis yang Komprehensi

Audit ini memiliki karakter komprehensif karena menggabungkan analisis biaya, kinerja, dan dampak dalam satu rangkaian evaluasi. Auditor tidak hanya melihat angka dalam laporan, tetapi juga melakukan observasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program (Mahmudi, 2019). Hal ini membuat hasil audit menjadi lebih terperinci dan memiliki nilai guna yang tinggi bagi instansi.

6. Menghasilkan Rekomendasi Perbaikan yang Konstruktif

Audit Value for Money tidak berhenti pada penemuan masalah, tetapi juga memberikan saran untuk memperbaiki kinerja instansi. Rekomendasi ini biasanya disusun berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan auditor (BPK RI, 2017). Dengan adanya rekomendasi, audit berfungsi sebagai alat pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

7. Menekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Karakteristik penting lainnya adalah audit ini membantu meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah maupun nasional. Pemerintah didorong untuk lebih terbuka dalam menjelaskan bagaimana dana publik digunakan dan apa hasilnya (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, audit ini memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

2.4 Tahapan *Value For Money Audit*

Tahapan *Value for Money Audit* umumnya dilakukan secara sistematis agar auditor dapat menilai apakah suatu program sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Berikut tahapan audit yang biasanya dijalankan:

1. Tahap Perencanaan Audit

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting karena menentukan arah dan fokus audit yang akan dilakukan. Pada tahap ini auditor mencoba memahami kondisi organisasi, tujuan program, serta potensi risiko yang mungkin muncul selama proses audit (Mahmudi, 2019). Dengan perencanaan yang matang, auditor dapat memastikan bahwa kegiatan audit berjalan lebih terarah dan tidak menghabiskan waktu secara tidak perlu.

Selanjutnya, auditor menyusun tujuan audit, ruang lingkup, serta metode yang akan dipakai untuk mengumpulkan bukti. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses audit sesuai standar dan dapat menghasilkan temuan yang akurat (BPK RI, 2017). Tahap perencanaan ini juga membantu auditor menentukan teknik pengumpulan data yang tepat.

Pada tahap ini auditor juga membuat jadwal dan alokasi sumber daya, baik dari sisi waktu maupun tenaga. Penyusunan jadwal tersebut bertujuan agar proses audit dapat dilaksanakan secara efisien tanpa mengganggu aktivitas organisasi yang diaudit (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, tahap perencanaan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan audit kinerja.

2. Tahap Pengumpulan dan Analisis Bukti

Tahap pengumpulan bukti dilakukan setelah rencana audit disusun dan disetujui. Auditor mulai mengumpulkan informasi melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, atau analisis data terkait program yang dinilai (Pattinama & Leunupun, 2021). Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana program dijalankan.

Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat apakah kegiatan sudah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Auditor membandingkan temuan dengan standar kinerja, target organisasi, atau pedoman pelaksanaan yang berlaku (Mahmudi, 2019). Analisis ini membantu auditor melihat kekuatan maupun kelemahan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, auditor menilai apakah bukti yang dikumpulkan sudah cukup, relevan, dan dapat diandalkan. Penilaian ini penting agar kesimpulan audit tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi benar-benar didukung oleh data yang kuat (BPK RI, 2017). Dengan demikian, proses pengumpulan bukti memastikan hasil audit lebih objektif.

3. Tahap Evaluasi Kinerja dan Identifikasi Temuan

Setelah bukti terkumpul, auditor mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program atau kegiatan yang sedang diperiksa. Pada tahap ini auditor membandingkan hasil nyata dengan tujuan atau indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019). Perbandingan tersebut membantu auditor menentukan apakah program berhasil atau masih perlu perbaikan.

Dalam proses evaluasi, auditor juga mengidentifikasi temuan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Temuan tersebut dapat berupa pemborosan anggaran, prosedur yang tidak efisien, atau hasil program yang tidak sesuai harapan (Mardiasmo, 2018). Temuan ini nantinya menjadi dasar utama rekomendasi yang akan disampaikan auditor.

Setiap temuan harus dijelaskan secara jelas dengan dukungan data agar mudah dipahami oleh pihak manajemen. Dengan penyajian yang terstruktur, temuan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas programnya (BPK RI, 2017). Oleh karena itu, evaluasi kinerja menjadi tahapan penting dalam menentukan arah rekomendasi.

4. Tahap Penyusunan Laporan Audit

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan audit yang merangkum seluruh proses dan hasil pemeriksaan. Laporan ini berisi informasi mengenai latar belakang audit, ruang lingkup, temuan-temuan, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (Mahmudi, 2019). Laporan audit menjadi dokumen resmi yang menunjukkan akuntabilitas auditor.

Dalam penyusunan laporan, auditor harus menyampaikan hasil audit secara objektif dan mudah dipahami. Kalimat yang digunakan harus jelas, ringkas, serta mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa memihak pada pihak mana pun (Mardiasmo, 2018). Penyusunan laporan yang baik dapat membantu instansi memahami masalah yang terjadi.

Laporan audit kemudian diserahkan kepada pihak manajemen untuk ditinjau dan ditindaklanjuti. Proses ini penting karena laporan hanya akan bermanfaat jika pihak organisasi benar-benar menggunakan rekomendasi yang diberikan (BPK RI, 2017). Dengan demikian, penyusunan laporan menjadi bagian penting dari siklus audit kinerja.

5. Tahap Tindak Lanjut Rekomendasi

Tahap tindak lanjut merupakan langkah akhir dari audit kinerja dan menjadi indikator apakah audit tersebut memberikan dampak nyata bagi organisasi. Pada tahap ini, pihak manajemen diminta melaksanakan perbaikan berdasarkan rekomendasi auditor (Mahmudi, 2019). Pelaksanaan tindak lanjut menunjukkan komitmen organisasi terhadap peningkatan kinerja.

Auditor biasanya akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa rekomendasi benar-benar dijalankan. Pemantauan dapat dilakukan melalui laporan kemajuan, kunjungan ulang, atau pemeriksaan tambahan jika diperlukan (Pattinama & Leunupun, 2021). Pemantauan ini penting agar perubahan yang disarankan tetap berjalan konsisten.

Tahap tindak lanjut menjadi bukti bahwa audit kinerja tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga meminta adanya perbaikan nyata. Jika tindak lanjut dilakukan secara efektif, maka organisasi akan lebih mudah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2018). Karena itu, tahap ini menjadi bagian penting dalam siklus *Value for Money Audit*.

2.5 Audit Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas dalam *Value for Money Audit*

Audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan inti dari *Value for Money Audit*. Ketiga prinsip ini digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan pemerintah dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut.

1. Audit Ekonomi

Audit ekonomi menekankan bagaimana organisasi memperoleh sumber daya dengan biaya yang paling rendah tanpa mengurangi kualitas. Fokusnya pada *input*, yaitu barang, jasa, atau sumber daya lain yang digunakan dalam pelaksanaan program. Auditor menilai apakah pembelian atau penggunaan dana sudah dilakukan secara hemat, kompetitif, dan sesuai standar. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa organisasi tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Contohnya,

auditor memeriksa apakah instansi membeli bahan dengan harga wajar atau malah membayar lebih mahal dari harga pasar.

2. Audit Efisiensi

Audit efisiensi melihat hubungan antara input dan output, yaitu bagaimana sumber daya digunakan untuk menghasilkan hasil tertentu. Program dikatakan efisien ketika menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. Auditor membandingkan volume kerja, waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan terhadap hasil yang dicapai. Efisiensi menilai apakah proses kerja sudah dilakukan dengan cara yang paling baik. Contohnya, auditor melihat apakah suatu layanan publik dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih cepat tanpa menambah biaya.

3. Audit Efektivitas

Audit efektivitas menilai sejauh mana tujuan atau sasaran program berhasil dicapai. Fokusnya pada output dan outcome, yaitu hasil akhir dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Program dinilai efektif jika target yang direncanakan benar-benar tercapai. Auditor juga menilai apakah metode yang digunakan merupakan pilihan terbaik untuk menghasilkan tujuan tersebut. Contohnya, auditor memeriksa apakah program bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penerapan ketiga prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas memberikan gambaran yang lengkap tentang kualitas kinerja organisasi publik. Ekonomi memastikan pengeluaran dilakukan dengan hemat, efisiensi memastikan proses berlangsung optimal, dan efektivitas memastikan tujuan benar-benar tercapai. Oleh karena itu, gabungan ketiganya menjadi dasar penting dalam *Value for Money Audit* untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan dengan maksimal (Suhayati, 2011).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money Audit* adalah audit kinerja yang menilai apakah anggaran publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Audit ini tidak hanya memeriksa kepatuhan aturan, tetapi juga menilai apakah program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Audit ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki transparansi, serta membantu pemerintah menemukan kelemahan dan memperbaiki risiko. Selain itu, audit ini memiliki karakteristik khusus, seperti fokus pada kinerja, penggunaan prinsip 3E, serta penilaian menyeluruh mulai dari input, proses, hingga hasil.

Tahapan audit dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi temuan, penyusunan laporan, dan tindak lanjut. Penerapan prinsip 3E menjadi inti dari proses ini karena membantu auditor menilai apakah program berjalan hemat, efisien, dan mencapai tujuan. Secara ringkas, *Value for Money Audit* membantu pemerintah memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, penulis menyarankan pertama, instansi pemerintah perlu memperbaiki perencanaan anggaran agar prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat diterapkan sejak awal. Kedua, instansi yang diaudit perlu menyediakan data dan informasi yang lengkap agar auditor dapat bekerja lebih akurat. Ketiga, rekomendasi audit harus benar-benar ditindaklanjuti agar perbaikan kinerja dapat berjalan dan pelayanan publik semakin baik. Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan audit *Value for Money* dapat menjadi alat perbaikan yang berkelanjutan bagi pengelolaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Pemeriksaan Kinerja*. BPK RI.
- Fikri, A. (2020). *Audit Kinerja pada Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fikri, A. (2022). *Audit Kinerja dan Pengawasan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Glynn, J. J., Gray, A., & Jenkins, B. (1992). *Public Sector Financial Control and Accounting*. Blackwell.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pattinama, M., & Leunupun, P. (2021). Audit kinerja dalam peningkatan akuntabilitas sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–123.
- Suhayati, E. (2011). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

STUDI KASUS

Studi Kasus:

Value for Money Audit pada Program Bantuan Pangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Mandala melaksanakan Program Bantuan Pangan Daerah (BPAD) dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk memberikan paket sembako kepada 15.000 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp12 miliar per tahun.

Namun, hasil monitoring internal menunjukkan beberapa masalah berikut:

1. Dari total anggaran Rp12 miliar, ternyata dana yang terserap hanya Rp9,5 miliar, namun jumlah penerima bantuan yang terlayani hanya 10.200 KPM, jauh dari target semula.
2. Harga pembelian beras dan bahan sembako lain lebih tinggi 20–30% dibandingkan harga pasar setempat.
3. Dalam proses distribusi, beberapa kecamatan mengalami keterlambatan hingga 10 hari, sehingga banyak bantuan tidak diterima tepat waktu.
4. Evaluasi dampak menunjukkan bahwa hanya 58% penerima bantuan yang merasa program ini benar-benar membantu kebutuhan pangan keluarga.
5. Terdapat laporan bahwa mekanisme pendataan penerima bantuan tidak diperbarui selama dua tahun, sehingga beberapa keluarga yang sudah mampu masih masuk daftar penerima.

Pemerintah daerah kemudian meminta auditor untuk melakukan *Value for Money Audit* terhadap program BPAD untuk mengetahui sejauh mana program berjalan ekonomis, efisien, dan efektif.

Pertanyaannya:

1. Berdasarkan data dalam studi kasus, jelaskan apakah program BPAD sudah memenuhi prinsip ekonomi. Berikan alasan yang jelas!
2. Berdasarkan hubungan input–output, analisis apakah program ini sudah berjalan efisien. Jelaskan menggunakan data yang tersedia!

3. Nilai apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Apakah program ini dapat dikatakan efektif? Jelaskan alasannya!
4. Sebutkan minimal tiga temuan audit yang dapat diidentifikasi berdasarkan prinsip 3E.
5. Berikan tiga rekomendasi untuk memperbaiki kinerja program BPAD agar lebih sesuai dengan prinsip Value for Money.

SOAL POST TEST

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan *Value for Money Audit* dan mengapa audit ini penting diterapkan dalam sektor publik!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga karakteristik utama *Value for Money Audit* yang membedakannya dari audit keuangan biasa!
3. Uraikan kembali tahapan-tahapan dalam *Value for Money Audit* dan jelaskan mengapa setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas!
4. Jelaskan perbedaan konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam *Value for Money Audit* serta berikan masing-masing contohnya di sektor pemerintah!
5. Mengapa tindak lanjut rekomendasi audit menjadi bagian penting dalam *Value for Money Audit*? Berikan penjelasan disertai contoh situasi yang relevan!